

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Amirudin, Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Aziz Syamsudin, 2014, *Tindak pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Kedua, Jakarta, Kencana.
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Hendarman Supandji, 2007, *Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- I Dewa Made Suartha 2015, *Hukum Pidana Korporasi*, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, Malang, Setara Press
- Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi*, Kebijakan Integral (Interl Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Bandung, Nuansa Aulia.
- Lamintang P.A.F, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Marpaung, Leden. 1991, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 1982. *Proses Penegakan Perkara Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Mansur Kartayana, 2017, *Korupsi & Pembuktian Terbalik*, Jakarta, Kencana
- Mahrus Ali, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Barda Nawawi Arief*, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- M. Fauzan, 2015, *Peranan PERMA dan SEMA sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, Jakarta Kencana.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Monang Siahaan, 2019, *Pembuktian Terbalik dalam Mberantas Tindak Pidana Korupsi*, Sidoarjo, Uwais Inspirasi Indonesia

Rafinus Hotmaulana , 2013, *Pertanggungjawaban Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

Rosita, Lily dan Hari, Sasangka, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju

Sri Mamudji, et. al, 2005, *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, Jakarta, Fakultas Hukum.Universitas Indonesia.

W.J.S Poerwadarminta,1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Peraturan Jaksa Agung RI No: PER-028/A/JA/10/2014, tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporai

## **C. JURNAL**

Amirullah, “Korporasi dalam Perspektif Subyek Hukum Pidana”, *Al Daulah*, Vol 2 No.2. Tahun 2012.

- Ayu Nurul Alfia, Adji Semekto, dan Ninik Trihastuti, “Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional dalam Kebakaran Hutan di Riau dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, Tahun 2016
- Achmad Ratomi, “Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana dalam Menghadapi arus Globalisasi dan Industri)”, *Al’Adl*, Vol X No.1, Tahun 2018
- Budi Suhariyono, 2016, ”Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*
- Endi Arofa, “Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Bentuk Pidanaannya Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 5 Nomor 1, Tahun 2018.
- Elfina Lebrin, “Pengaruh Etika Bisnis terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkup Kejahatan Bisnis”, *Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol 12 No.1. Tahun 2010
- Henry Donald, ”Pertanggung Jawaban Korupsi Korporasi”, *Jurnal Rechtsvinding*. Vol., Tahun 2014.
- Herbert Rumanang, Bismar Nasution, Mahmul Siregar, dan Mahmud Mulyadi, “Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung No.2239 K/PID.SUS/2012)”, *USU Law Journal*, Vol 4 No.4. Tahun 2016
- Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, “Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana”, *HUMANIORA*, Vol.3 No.2 Tahun 2012.

#### **D. INTERNET**

- Donny Eka P, 2019, [ONLINE] dalam [https://www.academia.edu/6620198/Resume\\_ASASASAS\\_HUKUM\\_PIDANA\\_Karangan\\_DR.\\_Andi\\_Hamzah\\_S.H](https://www.academia.edu/6620198/Resume_ASASASAS_HUKUM_PIDANA_Karangan_DR._Andi_Hamzah_S.H), diakses tanggal 9 desember 2020 , Pukul 10.00 WIB
- Wana Alamsyah, 2020, [ONLINE] <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200914Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20SMT%20I%202020.pdf> diakses tanggal 10 Febuari 2021 , Pukul 12.00 WIB
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2020, [ONLINE] dalam TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan (kpk.go.id) diakses pada tanggal 11 Febuari 2021 , Pukul 14.00 WIB

Widyopramono, “*Pidana Kejahatan Korporasi*”, Suara Merdeka, 22 Juli 2014, [ONLINE] <http://berita.suaramerdeka.com/kejahatan-korporasi-diidentifikasi-dari-dua-hal/>, diakses tanggal 16 Juli 2021, Pukul 17.00 WIB

Irwan Adi Cahyadi, “*Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Indonesia*”, <https://media.neliti.com/media/publications/35079-ID>, diakses tanggal 10 Juli 2021, Pukul 19.00 WIB

#### **E. LAIN – LAIN**

Wawancara dengan Bapak Muhammad Nizar S.H, M.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jawa Timur (pada hari senin, tanggal 28 Januari 2021, pukul 13.40)

Wawancara dengan Bapak Heru Kamarullah S.H, M.H Kasi (Kepala Seksi) Kejaksaan Negeri Surabaya (pada hari senin, tanggal 15 Maret 2021, pukul 14.30)

Wawancara dengan Nur Rochman S.H, M.H, Selaku Jaksa bagian Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Surabaya, pada tanggal 4 Juni 2021 pukul 12.45 WIB.